

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi yang sudah berjalan lebih dari satu dasa warsa indonesia telah menambah hampir ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada aspek ini, isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang diberikan kepada daerah (pemerintah daerah), khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Reformasi pada aspek ini membuat masalah otonomi daerah menjadi komoditas yang laris manis di masyarakat (Halim, 2012:1).

Pemerintah daerah dewasa ini berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah yang semakin besar dan kritis terutama semenjak reformasi. Pemerintah telah melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia (Mardiasmo, 2010:4).

Menurut Halim (2012:35) Setelah era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik menuju pada terwujudnya *goodgovernance*, sebab *good governance* telah menjadi suatu paradigma baru yang sangat didambakan oleh masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki kaitan yang erat dengan tujuan dilakukannya *good governance* di indonesia. *Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangk mencapai tujuan organisasi (Halim 2012:17).

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan karena ketidak meratanya pembangunan yang berjalan menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Campur tangan pemerintah pusat juga menjadi alasan terhambatnya kreatifitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Menurut Mardiasmo (2010:9) salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah dan anggaran pendapatan daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan fungsi DPRD. Pada saat ini, daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berkedudukan geografis bagi perdagangan antara wilayah yang merupakan perlintasan dari kawasan pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Serta memiliki kekayaan di sektor-sektor lain diantaranya: pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, air, perdagangan, bangunan, transportasi, dan jasa-jasa. Dengan kekayaan yang begitu banyak Pemerintah Kabupaten OKU harus memiliki kinerja keuangan yang tinggi untuk dapat mengelola pendapatan daerah dan mengelola keuangan untuk kebutuhan Kabupaten OKU itu sendiri.

Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kemandirian, efisien dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan perkembangan ekonomi yang lebih meningkat. Dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Tahun 2015-2019 dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Kantor Badan Pendapatan Daerah:

Tabel 1.1

Laporan Keuangan Kabupaten OKU 2015-2019.

No	Tahun	PAD		BELANJA	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2015	106.821.471.992	98.756.154.905	1.220.349.843.787	1.085.467.499.050
2	2016	82.097.982.845	87.578.643.415	1.125.614.280.184	993.279.511.858
3	2017	150.283.269.983	172.013.164.446	1.297.686.974.811	1.186.374.978.507
4	2018	187.040.722.565	156.622.053.791	1.002.984.349.847	888.169.875.238
5	2019	134.320.959.286	145.563.548.512	1.082.679.691.886	874.723.091.056

Sumber: BPKAD Kabupaten OKU 2015-2019.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas didapatkan bahwa pendapatan yang memiliki anggaran lebih dari yang terealisasi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.106.821.471.992,52 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.98.756.154.905,04 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.187.040.722.565,00 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp.156.622.053.791,34. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan pada tahun 2016, 2017 dan 2019 jumlah realisasi melebihi dari apa yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar terhadap pengelolaan aset daerah.

Belanja Pemerintah Kabupaten OKU tahun 2015-2019 belum terealisasikan secara optimal dikarenakan adanya pengadaan barang dan jasa yang melebihi kebutuhan, hal ini menunjukkan bahwa adanya pemborosan keuangan sehingga mengakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program atau belanja.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2015-2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD) Kabupaten OKU Tahun 2015-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Betujuan untuk mengetahui rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU Tahun 2015-2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **14.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sebagai informasi bagi peneliti sebelumnya.

### **14.2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah untu dapat menilai dan mengevaluasi rasio keuangan prusahaan di Kabupaten OKU.